



# **LAPORAN KEUANGAN**

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
PALANGKARAYA

**AUDITED**

**2024**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Palangka Raya, Mei 2025

Miharjo, S.St.Pi,MM

NIP 19790101 2003121003

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	60
A. Laporan Realisasi Anggaran Belanja	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Laporan Realisasi Pendapatan	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKA RAYA**

JALAN ADONIS SAMAD BANDAR UDARA TJILIK RIWUT  
PALANGKA RAYA 73111, KALIMANTAN TENGAH, TELEPON (0536) 3235641  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [palangkaraya@bkipm.kkp.go.id](mailto:palangkaraya@bkipm.kkp.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Mei 2025

Kepala;



Miharjo, S.St.Pi, MM

NIP 19790101 2003121003

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.14.350.000 atau mencapai 11 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.134.050.000,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.33.225.435,- atau mencapai 131 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.25.425.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 September 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.5.906.930.709 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.10.945.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 5.758.842.458; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.5.752.707.622;

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3,809.708.304; sedangkan jumlah beban dari kegiatan

operasional adalah sebesar Rp. (3,798.358.304); sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (3.798.358.404). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.2.160.000; dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(3,824.719.554).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.8.603.593.563; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.( (3,824.719.554)) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.988.120.334; sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp.5,752.707.622.;

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	134.050.000	14.350.000	10,70	33.225.435
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>134.050.000</b>	<b>14.350.000</b>	<b>10,70</b>	<b>33.225.435</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	1.500.346.000	1.498.867.439	99,90	3.296.229.783
Belanja Barang	B.4	1.875.358.000	1.858.303.854	99,09	2.670.326.740
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	216.984.640
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.375.704.000</b>	<b>3.357.171.293</b>	<b>99,45</b>	<b>6.183.541.163</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**II. NERACA**

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA  
NERACA  
PER 31 Desember 2024 dan 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Perediaan	C.10	10.945.000	78.085.220
Jumlah Aset Lancar		10.945.000	78.085.220
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	2.894.875.000	3.460.256.000
Peralatan dan Mesin	C.15	3.710.596.170	5.851.003.716
Gedung dan Bangunan	C.16	2.953.823.000	4.748.612.698
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	127.355.000	227.575.600
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	29.130.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.927.806.712)	(5.764.717.873)
Jumlah Aset Tetap		5.758.842.458	8.551.860.141
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>5.769.787.458</b>	<b>8.629.945.361</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	17.079.836	26.351.798
Utang Yang Belum Ditagih	C.26	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.079.836	26.351.798
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>17.079.836</b>	<b>26.351.798</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	5.752.707.622	8.603.593.563
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>5.752.707.622</b>	<b>8.603.593.563</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>5.769.787.458</b>	<b>8.629.945.361</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	11.350.000	26.250.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>11.350.000</b>	<b>26.250.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	1.499.607.439	3.296.229.783
Beban Persediaan	D.3	84.358.220	147.754.905
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.182.813.128	1.547.266.863
Beban Pemeliharaan	D.5	341.543.902	445.463.155
Beban Perjalanan Dinas	D.6	308.164.862	501.939.910
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan	D.9	393.220.753	587.080.276
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>3.809.708.304</b>	<b>6.525.734.892</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.798.358.304)</b>	<b>(6.499.484.892)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		(28.521.250)	5.111.111
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		840.000	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		29.361.250	-
Surplus/defisit Pendapatan dari Kegiatan Non		2.160.000	1.797.590
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional L		2.160.000	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(26.361.250)</b>	<b>6.908.701</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.824.719.554)</b>	<b>(6.492.576.191)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR STASIUN KIPM PALANGKA RAYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 dan 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	8.603.593.563	8.945.854.026
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.824.719.554)	(6.492.576.191)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(14.286.721)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		<b>(14.286.721)</b>	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	988.120.334	6.150.315.728
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>5.752.707.622</b>	<b>8.603.593.563</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya

*Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis* Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangka Raya merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Jalan Adonis Samad Bandar Udara Tjilik Riwut dan membawahi 2 Wilayah Kerja yaitu Wilker Sampit Kotawaringin Timur, Wilker Pangkalan Bun Kotawaringin Barat yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Adapun pegawai di Stasiun karantina ikan berjumlah 7 orang Pegawai dan tenaga kontrak 11 orang.

Rencana Strategis Stasiun KIPM Palangka Raya :

Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain:

Visi : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman

Konsumsi dan Terpercaya

Misi : Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan terpercaya

Tujuan :

” Peningkatan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ”

Sasaran :

- ” Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ”.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman	25

Tahun	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	1.500.346.000	1.500.346.000
Belanja Barang	1.875.358.000	1.875.358.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.375.704.000</b>	<b>3.375.704.000</b>

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp.14.350.000*

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.14.350.000 atau mencapai 11 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp.134.050.000 Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	2.160.000	2.160.000	100,00
Pendapatan penjualan mesin	840.000	840.000	
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Stadarisasi	11.350.000	11.350.000	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.160.000	2.160.000	
<b>Jumlah</b>	<b>14.350.000</b>	<b>14.350.000</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2024 mengalami Kenaikan 18 persen dibandingkan Tahun TA 2023.

Realisasi

Belanja Negara

Rp.3.357.171.29

3

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.357.171.293 atau 99.45 % dari anggaran belanja sebesar Rp.3.375.704.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.500.346.000	1.498.867.439	99,90
Belanja Barang	1.875.358.000	1.858.303.854	99,09
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.375.704.000</b>	<b>3.357.171.293</b>	<b>99,45</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.375.704.000</b>	<b>3.357.171.293</b>	<b>99,45</b>

Dibandingkan dengan Tahun TA 2023, Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0.55 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.498.867.439	3.296.229.783	(54,53)
Belanja Barang	1.858.303.854	2.670.326.740	(30,41)
Belanja Modal	-	216.984.640	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.357.171.293</b>	<b>6.183.541.163</b>	<b>(45,71)</b>

Belanja

Pegawai

Rp.1.500.346.0

00

## B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.498.867.439 dan Rp.3.296.229.783 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar 4.28 persen dari TA 2023.

*Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	656.900.876	795.346.482	(17,41)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.365.000	6.802.480	(6,43)
Belanja Honorarium	59.400.000	96.498.000	(38,44)
Belanja Lembur	138.270.000	179.600.100	(23,01)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	584.251.928	968.065.635	(39,65)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.445.187.804</b>	<b>2.046.312.697</b>	<b>(29,38)</b>
Pembulatan Gaji PNS	5.768	12.653.686	
Pengembalian Belanja Gaji pokok PNS	-	-	-
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	(185.124)	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.445.008.448</b>	<b>2.058.966.383</b>	<b>(29,82)</b>

*Belanja  
Barang  
Rp.1.875.358.0  
00*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.858.303.854 dan Rp.2.670.326.740 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami Kenaikan 65% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	27.500.000	745.936.672	(96,31)
Belanja Barang Non Operasional	2.736.863	56.737.500	(95,18)
Belanja Jasa	130.047.770	498.953.817	(73,94)
Belanja Pemeliharaan	343.331.902	161.749.355	112,26
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	308.164.862	307.066.578	0,36
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.766.000	252.796.130	(96,93)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>819.547.397</b>	<b>2.023.240.052</b>	<b>(59,49)</b>
Pengembalian Belanja Jasa	-	-	-
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>819.547.397</b>	<b>2.023.240.052</b>	<b>(59,49)</b>

*Belanja Modal*

*Rp.0*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar 100% dibandingkan TA 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp.0,- mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp.216.984.640.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	0	216.984.640	-100,00
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>216.984.640</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>216.984.640</b>	<b>-100,00</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 Rp0,- dan TA 2023 Rp0,-

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 sebesar Rp. 0,- dan TA 2023 Rp. Rp0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2024 dan TA 2023.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
-	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

**C.1. Aset Lancar**

*Aset Lancar  
Rp.10.945.000  
,-*

Jumlah Aset Lancar Stasiun KIPM Palangka Raya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.10.945.000,- dan Rp.78.085.220. Aset Lancar Merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.00*

### **C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.00,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dan  
31 Desember 2023*

Keterangan	SEMESTER II TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank mandiri 8100126496571000	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### **C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank mandiri 8100126496571000	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0,-*

### **C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 Rp.0,- yang berasal dari Kartu Kredit Pemerintah(GUP) yang belum dibayar dan 2023 Rp0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang PNBP Rp0*

### **C.1.4. Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP Tahun 2024 dan 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Bagian Lancar Tagihan* **C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023*

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0*

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp(1.571). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2024 dan 2023*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Nilai Piutang Jk Pendek</b>	<b>% Penyisihan</b>	<b>Nilai Penyisihan</b>
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja  
Dibayar di  
Muka Rp0,*

**C.1.8. Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0*

**C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp.10.945.000*

**C.1.10. Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.10.945.000,- dan Rp.78.085.220,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Tahun TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	7.766.000	4.623.230
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
Bahan Baku	-	73.461.990
Suku Cadang	0	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.766.000</b>	<b>78.085.220</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

## **C.2. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Stasiun KIPM Palangka Raya merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### **C.2.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.2.2. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

**C.2.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi

atas ketidak tertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang TA 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

*Aset Tetap*

*Rp.5.758.842.4*

*58,-*

**C.3. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.5.758.842.458,- dan Rp.8.551.860.141,- Aset Tetap merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun KIPM Palangka Raya berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan dan asset Tetap Lainnya

*Tanah*

*Rp.2.894.875.0*

*00,*

**C.3.1. Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.2.894.875.000,- dan Rp.3.460.256.000,- Mutasi nilai tanah tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>2.894.875.000</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP (208)	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.894.875.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah TA 2024*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	10960 m2	Kantor SKIPM Palangka Raya	2.894.875.000
<b>Jumlah</b>			<b>2.894.875.000</b>

Tanah yang berada di Wilker Sampit dan Wilker Pangkalan Bun dikuasai/digunakan oleh pihak Badan Karantina Indonesia beralih Status kepemilikan.

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp.3.710.596.1  
70,-*

**C.3.2. Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.3.710.596.170,- dan Rp.5.851.003.716,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>3.710.596.170</b>
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	0
<b>Hibah Barang</b>	<b>0</b>
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
<b>2024</b>	<b>3.710.596.170</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-3.277.292.854
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>433.303.316</b>

Terdapat Mutasi tambah sebesar Rp.0 Pada Aset Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang sebesar Rp.0,-

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp.2.953.823.  
000*

### **C.3.3. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.2.953.823.000 dan Rp.4.748.612.698. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>2.953.823.000</b>
Mutasi tambah:	
Penyelesaian pembangunan dgn KDP	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Perubahan Nilai Bangunan	-
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>2.953.823.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	471.980.232
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>3.425.803.232</b>

Tidak Terdapat penambahan Gedung dan Bangunan pada periode Semester II Tahun 2024

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp.127.355.000  
0*

### **C.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.127.355.000 dan Rp.227.575.600. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>127.355.000</b>
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>127.355.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(41.390.375)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>85.964.625</b>

Tidak ada tambah Jalan Irigasi dan Jaringan pada periode Tahun 2024.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp.0*

### **C.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.0; dan Rp.29.130.000. Terdapat mutasi berkurangnya atas aset tetap ini untuk Tahun 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-				0	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

### **C.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian KDP Gedung Bangunan Instalasi Stasiun KIPM Palangka Raya Sebagai Berikut :

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	SPK	Nilai SP2D
Jumlah			-

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(3.927.806.7  
12)*

### **C.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(3.927.806.712) dan Rp(5.764.717.873). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Tahun 2024 dan 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.710.596.170	3.277.292.854	433.303.316
2	Gedung dan Bangunan	2.953.823.000	471.980.232	2.481.842.768
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.355.000	41.390.375	85.964.625
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>6.791.774.170</b>	<b>3.790.663.461</b>	<b>3.001.110.709</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Lainnya*  
*Rp0*

#### **C.4. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp0. Dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Stasiun KIPM Palangka Raya terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak*  
*Berwujud Rp0*

#### **C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2024*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
-	0
-	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp.0,-*

#### **C.4.2 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	-
Akumulasi Penyusutan	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	-

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp(0)*

### **C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Kewajiban*

*Jangka*

*Pendek Rp0,-*

### **C.5. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

*Uang Muka*

*dari KPPN*

*Rp.0*

#### **C.5.1. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.96.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada*

*Pihak Ketiga*

*Rp.17.079.836*

#### **C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.17.079.836; dan Rp.26.351.798,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Utang kepada Pihak ketiga lainnya		
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp0*

**C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp.0,-*

**C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.0,- dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA 2023 dan TA 2024*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Ekuitas*

*Rp.5.752.707.  
622,-*

**C.7. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.752.707.622 dan Rp.8.603.593.563 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP*

*Rp.11.350.000  
,-*

**D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.11.350.000,- dan Rp.26.250.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun TA2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023
PNBP	11.350.000	26.250.000
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>11.350.000</b>	<b>26.250.000</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya. dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu.

*Beban*

*Pegawai*

*Rp.1.499.607.439,-*

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.499.607.439,- dan Rp.3.296.229.783,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun TA2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	513.752.864	1.276.378.182	-60
Beban Tunjangan-tunjangan	139.908.476	0	#DIV/0!
beban tunj umum pns	3.245.000	7.532.480	
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	119.439.171		
Beban Pegawai (Tuj Khusus/Kegiatan)	584.251.928	968.065.635	-40
Beban Lembur	138.270.000	197.600.100	-30
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		-	
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>1.498.867.439</b>	<b>2.449.576.397</b>	<b>-39</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp.84.358.220  
,-*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.84.358.220,- dan Rp.147.754.905,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Triwulan III Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	11.221.230	59.877.330	-81
Beban Persediaan Bahan Baku	73.136.990	80.087.815	-9
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>84.358.220</b>	<b>139.965.145</b>	<b>-40</b>

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp.1.182.813.  
128,-*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023- adalah masing-masing sebesar Rp.1.182.813.128 dan Rp.1.547.266.863 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	688.067.896	612.568.801	12
Beban Penambah Daya Tahan tTubuh	90.273.000	62.399.162	45
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.980.150	6.982.193	-14
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	127.716.000	146.898.000	-13
Beban Barang Operasional Lainnya	27.803.000	30.379.000	-8
Beban Barang Opr - Penanganan Pandemi Covid-19	0	16.999.880	-100
Beban Bahan	262.670.649	151.034.688	74
Beban Honor Output Kegiatan	250.000	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000	6.000.000	-50
Beban Daya dan Jasa	341.506.168	407.000.610	-16
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>1.547.266.863</b>	<b>1.440.262.334</b>	<b>12,32</b>

*Beban Pemeliharaan Rp.341.543.902,-*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.341.543.902,- dan Rp.445463155,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203.343.030	147.417.665	38
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	236.120.125	213.733.898	10
Beban BMP dan Pelumas	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.000.000	7.748.220	-23
Beban persediaan suku cadang	0	39.142.000	-23
<b>Jumlah</b>	<b>341.543.902</b>	<b>408.041.783</b>	<b>-16,30</b>

*Beban*

*Perjalanan*

*Dinas*

*Rp.308.164.86*

*2,-*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.308.164.862,- dan Rp.501.939.910,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun TA.2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	330.501.629	219.260.922	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.550.000	4.540.000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	126.888.281	51.167.023	-
<b>Jumlah</b>	<b>308.164.862</b>	<b>274.967.945</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp0*

### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Stasiun KIPM Palangka Raya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2024.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0*

### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial

untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA.2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban*

*Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp.393.220.75*

*3*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.393.220.753 dan Rp.587.080.276,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun  
TA.2024 dan 2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	466.759.035	485.610.031	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.292.312	114.292.312	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.447.314	1.447.314	-
Beban Penyusutan Irigasi	1.302.740	1.302.740	-
Beban Penyusutan Jaringan	3.278.875	3.278.875	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>587.080.276</b>	<b>605.931.272</b>	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0*

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024

*Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa* **D.13 Pos Luar Biasa**

*Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester II Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa semester II TA2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBPN	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendapatan PNBPN diatas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang mengalami rusak berat karena bencana longsor bukit di Jayapura.Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp.8.603.593.563,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.8.603.593.563,- dan Rp.8.945.854.026,-

*Defisit LO*  
*Rp(3.824.719.554)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(3.824.719.554) dan Rp(6.492.576.191) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp0*

### **E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0*

### **E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*

**E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset Tetap Rp0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0*

**E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Lain-Lain Rp0*

**E.4.5. Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp1.571. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi*

*Antar Entitas*

*Rp.988.120.33*

*4,-*

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.988.120.334,- dan Rp.6.150.315.728. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(14.350.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.357.171.293
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.342.821.293</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(14.350.000) sedangkan DKEL sebesar Rp.3.357.171.293,-

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
2	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0-. yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	Rp -
2	-	-	Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp.5.752.707.*  
*622*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.5.752.707.622,- dan Rp.8.603.593.563,-

### **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

#### **F.2 Program Prioritas Nasional**

Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp.222,412,000; dan realisasi senilai Rp.208,026,934

atau 98,84% dari pagu, dengan rincian disajikan pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Satker Stasiun KIPM Palangka Raya per 31 Desember 2024. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan (terrealisasi) dikarenakan msh dalam tahap saldo blokir

*Program Prioritas Nasional TA 2024*

<b>Rincian Output</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>
3989.PDC - Sertifikasi Produk	10,000.000	9,959,200	99,59
3989.PDC - Sertifikasi Produk	10,000,000	9,962,500	99.63%
3989.PDF - Sertifikasi Lembaga	56,912,000	56,893,739	99.97%
3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	20,000,000	12,868,000	64.34%
7010.PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	70,000,000	62,903,560	89.86%
7010.PDD - Standarisasi Lembaga	8,500,000	8,495,695	99.95%
7010.PDD - Standarisasi Lembaga	30,000,000	29,996,000	99.99%
7010.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	8,500,000	8,474,120	99.70%
7010.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	8,500,000	8,474,120	99.70%
<b>Total</b>	<b>222,412,000</b>	<b>208,026,934</b>	<b>98.84%</b>

## F.2 CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Stasiun KIPM Palangkaraya 2024 sebagai Berikut :

### LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)  
 Unit Organisasi : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (13)  
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya (649657)  
 Fungsi : Ekonomi (04)  
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03)  
 Program : Dukungan Manajemen (WA)  
 Hasil Program : Perijinan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 Lokasi : Palangkaraya (06)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3989.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8.728.000	8.728.000	100,00%	1	1	Layanan	100,00%	
3989.EBA.962	Layanan Umum	27.900.000	27.862.195	99,864%	1	1	Layanan	100,00%	
3989.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	43.622.000	43.541.585	99,816%	1	1	Layanan	100,00%	
3989.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.955.836.000	2.953.600.138	99,924%	1	1	Layanan	100,00%	
3989.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	20.270.000	20.270.000	100,00%	24	24	Orang	100,00%	
3989.EBD.955	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	26.590.000	26.388.800	99,996%	1	1	Dokumen	100,00%	
3989.EBD.956	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.118.000	24.114.000	99,983%	1	1	Dokumen	100,00%	
3989.EBD.957	Layanan Manajemen Keuangan	14.240.000	14.239.000	99,993%	1	1	Dokumen	100,00%	
	Sub Total	3.121.704.000	3.119.343.718	99,924%					
	Penyesuaian Revisi	382.489.000	427.042.428	111,854%					
	DIPA/Pengembalian								
	Belanja di								
	Total								

### LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)  
 Unit Organisasi : Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (13)  
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya (649657)  
 Fungsi : Ekonomi (04)  
 Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03)  
 Program : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (IC)  
 Hasil Program : Perijinan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 Lokasi : Palangkaraya (06)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3989.ADF.001	Supplier yang menerapkan Cara Peranganan Ikan Yang Baik (CPB)	31.088.000	31.063.065	99,920%	5	5	Lembaga	100,00%	
7010.DCC.001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	9.000.000	9.000.000	100,000%	1	1	Kegiatan	100,00%	
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	70.000.000	62.803.560	89,862%	1	1	mendatukab	100,00%	
3989.PDC.001	Sertifikat Hazard Analyse Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk/pada LPI	10.000.000	9.939.200	99,592%	1	1	produk	100,00%	
3989.PDC.001	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	10.000.000	9.962.500	99,625%	1	1	produk	100,00%	
1010.PDQ.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	8.500.000	8.495.695	99,949%	1	1	Lembaga	100,00%	
7010.PDQ.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	30.000.000	29.996.000	99,987%	1	1	Lembaga	100,00%	
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	36.912.000	36.893.739	99,980%	15	15	Lembaga	100,00%	
7010.QIA.001	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.500.000	8.474.120	99,696%	1	1	Produk	100,00%	
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	20.000.000	12.868.000	64,340%	1	1	Lembaga	100,00%	
	Sub Total	254.000.000	239.615.679	94,337%					
	Penyesuaian Revisi	431.913.000	427.042.428	98,872%					
	DIPA/Pengembalian								
	Belanja di								
	Total								

## F.3 TEMATIK APBN

Untuk TA 2024, Tidak terdapat Tematik APBN di satker Stasiun KIPM Palangkaraya.

# LAMPIRAN